

RAIH PENGHARGAAN STBM KEMENKES Sleman, Kabupaten Terbaik



KR-Istimewa

Wabup Danang Maharsa bersama jajaran Dinas Kesehatan Sleman usai menerima penghargaan.

SLEMAN (KR) - Pemkab Sleman kembali menorehkan prestasi dalam pelayanan masyarakat. Kali ini, Pemkab Sleman mendapatkan penghargaan Kabupaten/Kota Terbaik Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Berkelanjutan Kategori Demand Creation dari Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI.

Penghargaan diserahkan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono kepada Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa pada acara Penghargaan Bidang Kesehatan Lingkungan dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional 2022 di Hotel Discovery Ancol Jakarta Utara, Rabu (23/11). "Merupakan suatu kebanggaan bagi Kabupaten Sleman dapat kembali meraih penghargaan STBM Berkelanjutan. Semoga dapat menjadi motivasi bagi Pemkab Sleman untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta dapat menorehkan prestasi kembali di bidang kesehatan ke depannya," ujar Danang.

Menurut Danang, ke depannya diperlukan upaya terobosan yang melibatkan semua pihak baik pemerintah, swasta dan masyarakat. Hal itu terkait sinkronisasi antar-sektor terkait pembangunan sanitasi untuk mencapai target universal access sanitasi.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Sleman dr Cahya Purnama mengatakan, saat ini progres STBM Kabupaten Sleman terdapat 84 Kelurahan atau sebesar 97,67 persen yang telah melaksanakan deklarasi 5 pilar STBM. "STBM tahun 2022 ini merupakan penghargaan ke 5 yang diraih Kabupaten Sleman setelah 4 tahun sebelumnya Kabupaten Sleman selalu meraih penghargaan STBM secara berturut-turut sejak tahun 2018," jelasnya. **(Has)-f**

Korpri Sleman Silaturahmi ke Mantan Sekda

SLEMAN (KR) - Korpri Sleman melakukan silaturahmi ke tiga mantan Sekda Sleman sekaligus mantan Ketua Korpri Sleman yakni Sumadi, Sunartono, dan Sutrisno. Kunjungan ini dilakukan untuk menjaga tradisi agar berkesinambungan ke depannya.

"Silaturahmi ini bermaksud untuk mohon doa restu, dukungan, dan arahan sehingga Dewan Pengurus Korpri tetap eksis, maju, amanah, dan bisa melayani anggotanya," kata Susmiarto, anggota rombongan Korpri Sleman yang juga merupakan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sleman, Rabu (23/11).

Sutrisno, mantan Seda Sleman periode 1999-2011 berpesan anggota Korpri harus mempunyai motivasi, ability, dan environment. "Motivasi, ability, dan environment harus dimiliki saat bekerja agar mampu menghadapi dan beradaptasi dalam perkembangan zaman," katanya.

Pesan senada disampaikan Sunartono saat menerima kedatangan Korpri Sleman di kediamannya, Jongke Tengah Sendangadi Mlati. Sunartono berpesan agar anggota Korpri Kabupaten Sleman harus dinamis dalam menghadapi pergeseran zaman.

Sementara Sumadi, mantan Sekda Sleman yang kini menjadi Penjabat (Pj) Walikota Kota Yogyakarta menyatakan, Korpri Sleman mempunyai banyak keunggulan-keunggulan, terutama untuk menyejahterakan anggotanya. Sehingga pihaknya mendorong Korpri di Pemkot Yogyakarta dan Pemda DIY untuk belajar ke Korpri Sleman.

Saya selalu memprovokasi teman-teman baik di Kota maupun di Pemda DIY untuk belajar ke Kabupaten Sleman, karena Sleman sudah bisa menjadi piloting (contoh) untuk pembinaan Korpri di Indonesia," kata Sumadi

saat menerima silaturahmi dari Korpri Sleman di Rumah Dinas Walikota Kota Yogyakarta.

Sumadi mengatakan program-program sosial Korpri Kabupaten Sleman sangat membantu bagi anggota baik yang masih aktif maupun yang sudah purna tugas. "Kepada pengurus Korpri Sleman agar selalu berintegritas dalam membawa diri baik di lingkungan kerja maupun di tengah masyarakat agar tetap amanah," pesannya. **(Has)-f**

Anggota DPRD Sleman dari Fraksi Gerindra M Arif Priyosusanto SSI mengatakan, berdasarkan data yang ada masih sekitar 60.000 warga yang sudah masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), namun belum mendapat bantuan apapun dari pemerintah pusat. Padahal kenaikan BBM kemarin itu sangat berdampak bagi masyarakat, khususnya warga kurang mampu.

"Ternyata masih banyak warga kurang mampu yang belum mendapat bantuan dalam bentuk apapun. Tentu ini menjadi perhatian kami agar mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah," kata Arif, Rabu (23/11).

Untuk itu dalam APBD Perubahan kemarin, pemerintah daerah mengalokasikan Rp 5,02 miliar yang digunakan sebagai bantuan dampak inflasi.

HASIL PANEN LEBIH MENJANJIKAN Budidaya Padi Organik Hasilkan 8,8 Ton/Hektare

NGEMPLAK (KR) - Lahan pertanian Kabupaten Sleman semakin terbatas dan kalah luasan dibanding kabupaten-kabupaten lain. Sehingga selain dengan menggenjot produksi padi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Sleman pun harus bermain pada produksi pertanian yang mempunyai nilai tinggi seperti pertanian padi secara organik.

"Pertanian organik merupakan sistem produksi pertanian yang menggunakan bahan-bahan alami dan menghindari atau membatasi penggunaan bahan kimia sintesis baik pupuk kimia/pabrik, pestisida, herbisida, maupun zat pengatur tumbuh. Budidaya pertanian padi secara organik merupakan salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk mencapai pertanian yang berkelanjutan serta ramah lingkungan. Budidaya padi organik di Kabu-

paten Sleman tersebar di antaranya di Cangkringan, Prambanan, Ngaglik dan Ngemplak dengan total luasan sekitar 20 hektare," ungkap Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (DP3) Sleman saat panen padi organik varietas Sinta Nur milik Kelompok Tani Mekar di Ngalian Widodomartani, Ngemplak, Rabu (23/11). Dari panen ini, diperoleh hasil ubinan rata-rata 5,5 kg per ubin atau 8,8 ton/ha. Dari produksi luasan sawah 2,5 Ha su-

dah langsung dibeli oleh Koperasi Petani Milenial Yogyakarta (Kompaky) dengan harga Rp 5.400/kg GKP.

"Lebih berbahagia lagi karena padi ini sudah mendapat sertifikasi oleh lembaga LeSOS (Lembaga Sertifikasi Organik Seloliman). Dengan adanya sertifikasi ini berarti telah memberikan kepercayaan kepada konsumen bahwa produk yang dihasilkan memang benar-benar organik," ujar Suparmono. Biaya sertifikasi organik



KR-Istimewa

Suparmono bersama anggota kelompok tani memperlihatkan hasil panen padi organik.

yang cukup mahal bagi petani pada tahap awal dibantu oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY.

Selain itu dengan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) yang sudah dimiliki sejak tahun 2019, kini Kelompok Tani Mekar mampu menjadi penghasil pupuk organik dengan nama PON.

"Yang menjadi kendala dalam pertanian organik adalah rendahnya produksi pada tahap peralihan konvensional ke organik dan tingginya biaya sertifikasi. Oleh karena itu, penerapan SOP budidaya padi organik akan sangat membantu petani meraih produksi yang tinggi," pungkas Suparmono. **(Has)-f**

SD Muh CC Juara Lomba Sekolah Hijau



KR-Istimewa

Sulamsi (tengah) memperlihatkan piagam kejuaraan.

DEPOK (KR) - SD Muhammadiyah Condongcatur (SD Muh CC) Depok Sleman juara I Lomba Sekolah Hijau tingkat Provinsi Jawa Tengah dan DIY. Penyerahan hadiah dilakukan bertepatan dengan pelaksanaan Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyiyah di Kampus 2 Gedung Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Sabtu (19/11).

Lomba diselenggarakan Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah bertema 'Implementasi AliMM Menuju Sekolah Hijau'.

Dimaksudkan untuk mendapatkan model bangunan pendidikan dasar dan menengah yang berkarakter 'arsitektur hijau'. Penilaian dilakukan atas bangunan pendidikan di lingkungan sekolah-sekolah Muhammadiyah dengan sistem kompetisi.

Kepala SD Muh CC Sulamsi SPd mengaku gembira atas keberhasilan sekolahnya meraih juara I Lomba Sekolah Hijau tingkat Jawa Tengah dan DIY. Selain piagam penghargaan, juga memperoleh uang pembinaan Rp 6 juta. **(No)-f**

KEPADATAN LALU LINTAS TINGGI Kapolresta Sleman Pimpin Rekayasa Arus

GAMPING (KR) - Kepadatan arus lalu lintas pagi hari di sejumlah ruas jalan di Kabupaten Sleman, menjadi atensi Kapolresta AKBP Ach Imam Rifai SH SIK M PICT M. Kapolresta memimpin langsung rekayasa arus lalu lintas di simpang empat Pelem Gurih Gamping, Rabu (23/11).

"Pagi hari di beberapa titik terjadi kepadatan arus kendaraan. Untuk mengatasinya, kami melakukan rekayasa arus lalu lintas," kata Kapolresta didampingi Kasat Lantas AKP Gunawan Setiyabudi SH MM.

Dalam pelaksanaan kegiatannya, Kapolresta memimpin pengaturan arus lalu lintas dari arah barat Jalan Wates. Di sepanjang jalan tersebut, juga terlihat sejumlah pelajar hendak menyebrang jalan, sehingga langsung dibantu oleh polisi.

Menurut Kapolresta, tingkat kepa-

datan arus lalu lintas di simpang Pelem Gurih, termasuk salah satu tertinggi di wilayah Sleman. Sehingga untuk mengantisipasi, pihaknya menerjunkan personel untuk membantu kelancaran lalu lintas tiap hari.

Tak hanya itu, keberadaan polisi juga diharapkan mampu menekan kecelakaan lalu lintas, yang masih menjadi momok di jalan raya.

"Kegiatan pengamanan pagi dilakukan, dengan harapan pengguna jalan tidak terhambat sampai tujuan. Termasuk memperlancar arus lalu lintas dari arah Jalan Wates," katanya.

Kapolresta mengimbau masyarakat berhati-hati dalam berlalulintas dan mengecek kelengkapan kendaraan. Upaya itu dilakukan agar perjalanan masyarakat menjadi aman dan lancar, serta menekan terjadinya kerawanan lalu lintas. **(Ayu)-f**



KR-Dok Satlantas Polresta Sleman

AKBP Ach Imam Rifai saat memimpin pengaturan rekayasa lalu lintas di Simpang Empat Pelem Gurih, Rabu (23/11).

DPRD KABUPATEN SLEMAN
SUARA WAKIL RAKYAT
Jl. Parasamya, Tridadi, Sleman, DIY Kode Pos 55511. Telp. (0274)868413, Fax (0274)868413

Berikan Bansos Bagi Warga Terdampak Inflasi

SLEMAN (KR) - DPRD Sleman bersama dengan eksekutif telah menyepakati untuk memberikan bantuan sosial (bansos) bagi warga yang terdampak inflasi kenaikan BBM. Mengingat masih banyak warga yang belum mendapat bantuan dari pemerintah pusat terkait kenaikan BBM beberapa waktu lalu.

Anggota DPRD Sleman dari Fraksi Gerindra M Arif Priyosusanto SSI mengatakan, berdasarkan data yang ada masih sekitar 60.000 warga yang sudah masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), namun belum mendapat bantuan apapun dari pemerintah pusat. Padahal kenaikan BBM kemarin itu sangat berdampak bagi masyarakat, khususnya warga kurang mampu.

"Ternyata masih banyak warga kurang mampu yang belum mendapat bantuan dalam bentuk apapun. Tentu ini menjadi perhatian kami agar mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah," kata Arif, Rabu (23/11).

Untuk itu dalam APBD Perubahan kemarin, pemerintah daerah mengalokasikan Rp 5,02 miliar yang digunakan sebagai bantuan dampak inflasi.

M Arif Priyosusanto SSI
Anggota DPRD Sleman dari Fraksi Gerindra



KR-Saifulah Nur Ichwani

M Arif Priyosusanto SSI

"Bansos ini menyasar kan masyarakat yang merasakan dampak inflasi. Tujuan dari bansos ini untuk meringankan beban masyarakat akibat dampak inflasi kenaikan BBM," papar Arif.

Setelah adanya pemberian bansos inflasi, harapannya warga yang belum masuk DTKS supaya didaftarkan ke DTKS. Sehingga ketika nanti ada bantuan dari pemerintah pusat, warga miskin dan rentan miskin bisa mendapat bantuan.

"Kami minta warga yang belum masuk ke DTKS, segera didaftarkan. Supaya kalau nanti ada program bantuan dari pusat, tidak tercecer lagi sehingga nanti pemerintah daerah tidak dikomplain warga," ujar Arif. **(Sni)-f**

nakan untuk warga yang terdampak inflasi kenaikan BBM. Dan dana itu sudah mulai didistribusikan kepada masyarakat yang terdampak," terang Ketua Komisi D DPRD Sleman ini.

Dikatakan, anggaran itu dikhususkan bagi warga yang tidak mampu, baik yang sudah dalam DTKS maupun belum, namun memang sangat terdampak inflasi.

Selain itu bansos juga diberikan kepada pekerja yang terdampak inflasi seperti tukang ojek, juru parkir, penjaga pasar dan lainnya.

"Bansos ini menyasar kan masyarakat yang merasakan dampak inflasi. Tujuan dari bansos ini untuk meringankan beban masyarakat akibat dampak inflasi kenaikan BBM," papar Arif.

Setelah adanya pemberian bansos inflasi, harapannya warga yang belum masuk DTKS supaya didaftarkan ke DTKS. Sehingga ketika nanti ada bantuan dari pemerintah pusat, warga miskin dan rentan miskin bisa mendapat bantuan.

"Kami minta warga yang belum masuk ke DTKS, segera didaftarkan. Supaya kalau nanti ada program bantuan dari pusat, tidak tercecer lagi sehingga nanti pemerintah daerah tidak dikomplain warga," ujar Arif. **(Sni)-f**

Sesarengan mBangun Sleman

Jambore Kewirausahaan 2022

Jalin Pemasaran dan Kemitraan UMKM di Sleman

AKHIR minggu ini akan berlangsung acara Jambore Kewirausahaan Sosial di lapangan Dunggung Sleman, 24-26 November. Acara yang menampilkan pameran dan gelar dagang produk unggulan tersebut penting untuk diikuti sebab inti sarinya adalah ingin memajukan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui pameran produknya. Selain melalui stan penjualan langsung, ada acara temu bisnis dan gelar wicara (talk show). Tak ketinggalan ada pentas seni dan berbagai lomba.

Dengan demikian acara itu menyediakan peluang yang sangat bagus bagi para pelaku UMKM untuk memasarkan, mengembangkan pasar, dan mengembangkan jejaring. Semoga banyak pelaku UMKM di Sleman yang bisa memanfaatkan peluang tersebut.

Telah diketahui bahwa UMKM merupakan penyumbang ekonomi nasional, khususnya di DIY. Penggerak utama ekonomi kita adalah UMKM. Dari keseluruhan entitas usaha di DIY, proporsi UMKM mencapai lebih dari 95 persen.

UMKM juga merupakan katup penyelamat saat terjadi resesi ekonomi. Melalui perputaran uang dalam masyarakat kita sendiri, roda ekonomi kita bisa terus berputar. Melalui perputaran uang di UMKM banyak warga yang berpenghasilan secara harian tetap memperoleh rezeki.

Jambore Kewirausahaan Sosial merupakan bagian dari pembinaan terhadap para pelaku UMKM yang dirintis melalui program usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS). Program tersebut telah lama dirintis dan dikembangkan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), didukung dinas dan badan terkait pada level provinsi dan kabupaten/kota.

Ide dasarnya adalah ingin meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui program KB. Setelah keluarga berhasil membatasi jumlah kelahiran, apakah kesejahteraan otomatis terwujud? Tentu

Danang Maharsa SE



tidak. Kesejahteraan bisa diraih jika pendapatan keluarga meningkat.

Para ibu didorong, dilatih, dan difasilitasi untuk memiliki usaha super mikro alias usaha yang benar-benar berawal dari nol. Melalui pertemuan rutin, para ibu dikuatkan motivasinya, dilatih keterampilan, dan belajar serta berjejaring bersama. Perlahan-lahan usaha mereka bisa berkembang. Bersama para penyuluh KB dan para relawan, pemerintah memberikan pendampingan serta fasilitasi pemasaran produk. Salah satu bentuknya adalah penyelenggaraan pameran, mulai dari skala kecil, menengah hingga skala besar.

Jambore Kewirausahaan Sosial kali ini merupakan bentuk fasilitasi pemasaran skala besar. Selain menyediakan lebih dari 300 stan pameran dan penjualan, juga diselenggarakan temu bisnis.

Para pebisnis dari berbagai wilayah dipertemukan dengan para pelaku UMKM khususnya dari wilayah Sleman dan DIY. Harapannya bisa terbangun kerja sama dan kemitraan sehingga usaha mereka semakin lancar dan terus berkembang.

Acara lainnya adalah gelar wicara atau talks show yang menghadirkan pembicara yang sangat ahli di bidangnya. Mereka bukan sekadar ahli berkata-kata melainkan ahli karena terbukti sukses menjalankan bisnis. Jadi para pelaku usaha mikro bisa kulak ilmu sebanyak mungkin.

Saya sangat berharap para penyuluh KB, para kader, dan para pendamping UPPKS dapat memotivasi dampingannya agar memanfaatkan peluang ini sebaik mungkin. Ajaklah mereka untuk datang. Dampingi mereka untuk belajar dan menyerap ilmu. Kemudian lakukan diskusi untuk menerapkan pelajaran yang didapat. Dari situ kesejahteraan mereka bisa meningkat. Dari situ pula upaya pengentasan kemiskinan bisa dilakukan. **(Has)-f**